



**ANALISIS EFEKTIVITAS ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
PADA BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA (BRSKPN)
INSYAF MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

SUSANTI
1615100304

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

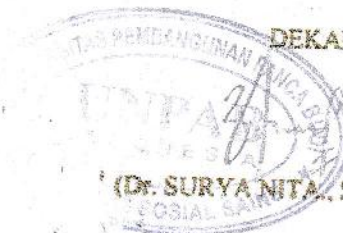
NAMA : SUSANTI
NPM : 1615100304
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS ANGGARAN DAN REALISASI
BELANJA PADA FALSAH REHABILITASI SOSIAL KORBAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA (BRSKPN) INSYAF MEDAN

MEDAN, JULI 2020

KETUA PROGRAM STUDI

(JUNAWAN, S.E., M.Si)

DEKAN



(Dr. SURYA NITA, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING I

(Dr. RAHIMA Er. FURBA, S.E., M.Si, Ak., C.A.)

PEMBIMBING II

(DONI EFRIZAH, S.S., M.S)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SUSANTI
NPM : 1615100304
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS ANGGARAN DAN REALISASI
BELANJA PADA BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA (BRSKPN) INSYAF MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juli 2020



(Susanti)

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : SUSANTI
N. P. M : 1615100304
Tempat/Tgl. Lahir : BANDAR KLIPPA / 1982-05-04
Alamat : Jl. Duren Desa Tanjung Anom
No. HP : 058277856795
Nama Orang Tua : SUKANDAR/ALM. INTEN
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Efektivitas Anggaran dan Realisasi Belanja pada Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (BRSKPN) Insyaf Medan

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 27 Agustus 2020
Yang Membuat Pernyataan



terai 6000

SUSANTI
1615100304

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana efektivitas anggaran dan realisasi belanja pada Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode desain deskriptif statistik. Data penelitian dari tahun 2016 – 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 realisasi anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan sebesar 96,87%, sehingga dapat dikatakan realisasi anggaran cukup efektif. Tahun 2017 realisasi anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan sebesar 98,23%, sehingga dapat dikatakan realisasi anggaran cukup efektif. Tahun 2018 realisasi anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan sebesar 99,81%, sehingga dapat dikatakan realisasi anggaran cukup efektif. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 sampai 2018 realisasi anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan belum dinyatakan efektif karena tidak mencapai 100%. Tingkat efektivitas anggaran belanja terus berfluktuasi dari tahun ketahun, kadang mengalami peningkatan kadang mengalami penurunan. Naik turunnya tingkat efektivitas anggaran belanja disebabkan dimana realisasi anggaran yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu pengeluaran anggaran belanja tidak tepat waktu dalam pembiayaan anggaran belanja.

Kata Kunci : Efektivitas Anggaran dan Realisasi Belanja

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out how the effectiveness of the budget and the realization of spending at the Institute for Social Rehabilitation of Drug Abuse Victims (BRSKPN) Medan Insyaf. The analytical method used in this research is a descriptive statistical design method. Research data from 2016 - 2018. The results of this study indicate that in 2016 the realization of the budget for the Social Rehabilitation of Drug Abuse Victims (BRSKPN) Medan Insyaf amounted to 96.87%, so it can be said the budget realization is quite effective. In 2017 the budget realization of the Insyaf Medan Social Rehabilitation Victims of Drug Abuse Agency (BRSKPN) was 98.23%, so it can be said that the budget realization was quite effective. In 2018 the realization of the budget for the Social Rehabilitation of Drug Abuse Victims (BRSKPN) Medan Insyaf amounted to 99.81%, so it can be said the budget realization is quite effective. It can be seen that in 2016 to 2018 the realization of the budget of the Insyaf Medan Social Rehabilitation Victims of Drug Abuse (BRSKPN) has not been declared effective because it has not reached 100%. The level of effectiveness of the expenditure budget continues to fluctuate from year to year, sometimes increasing sometimes decreasing. Rise and fall of the level of effectiveness of the expenditure budget is caused where the realization of the budget achieved is not in accordance with the target set. In addition, the expenditure budget is not timely in financing the budget.

Keywords : Budget Effectiveness and Realization of Expenditures

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Akuntabilitas	7
2.1.2 Anggaran Sektor Publik	15
2.1.3 Kejelasan Sasaran Anggaran.....	32
2.1.4 Laporan Realisasi Anggaran Publik.....	38
2.1.5 Efektivitas Realisasi Anggaran Sektor Publik	45
2.2 Penelitian Sebelumnya	47
2.3 Kerangka Konseptual.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	50
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	50
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	51
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.6 Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	54
4.1.1 Profil Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan	54
4.1.2 Efektivitas Realisasi Anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan	55
4.2 Pembahasan.....	58

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1 Kesimpulan	60
	5.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Anggaran Belanja BRSKPN Insyaf Medan	7
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya	47
Tabel 3.1 Skedul Proses penelitian	50
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	51
Tabel 4.1 Data Anggaran dan Realisasi Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan Tahun 2016 sampai 2018	55
Tabel 4.2 Data Efektivitas Realisasi Anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan Tahun 2016 sampai 2018	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	49

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW atas segala rahmat, berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Efektivitas Anggaran Dan Realisasi Belanja Pada Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan”**.

Dalam penyusunan proposal ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran, motivasi, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan SE., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Junawan, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Dr. Rahima Br. Purba, SE. M.Si, Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Doni Efrizah, SS. MS i., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
7. Kepada seluruh keluargaku dan teman-temanku, terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, Juli 2020

Penulis

Susanti

NPM : 1615100304

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Anggaran publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh publik, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan publik. Laporan realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas.

Anggaran dalam sektor publik merupakan tulang punggung (*back-bone*) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan

salah satu bentuk informasi yang dapat disampaikan secara relevan apabila menggunakan sistem yang tepat pula, hal tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaan, terutama bagi para pengambil keputusan harus dapat menentukan segala sesuatunya dengan efektif bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Efektivitas sangat penting dalam pengukuran atau perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Menurut Mahmudi (2016:22), efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan. Menurut Mahmudi (2016:25), standart ideal efektivitas realisasi anggaran yaitu sebesar 100%.

Penilaian terhadap efektivitas pada BRSKPN Insyaf Medan lebih ditekankan pada penilaian Laporan BRSKPN Insyaf Medan yang dibuat setiap tahun anggaran. Penilaian kinerja melalui LAKIP hanya bertumpu pada *output* yang diperoleh oleh BRSKPN Insyaf Medan dengan membandingkan rencana yang ingin dicapai tanpa memperhatikan *outcome*. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi tersebut.

Tabel 1.1 Data Anggaran Belanja BRSKPN Insyaf Medan

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Standart Ideal 100%
2016	15.017.046.000	14.547.009.109	96,87	Cukup Efektif
2017	10.846.683.000	10.654.612.916	98,23	Cukup Efektif
2018	11.832.766.000	11.809.800.212	99,81	Cukup Efektif

Sumber: BRSKPN Insyaf Medan (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa cukup efektif anggaran belanja BRSKPN Insyaf Medan pada tahun 2016 sampai 2018, dimana hasil

persentasenya tidak mencapai 100%. Target dan realisasi tidak sesuai dengan yang diharapkan dan realisasinya cenderung mengalami fluktuasi, yang artinya terdapat beberapa kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Dari tabel diatas juga dapat dijelaskan bahwa dalam tiap tahun penggunaan anggaran pada BRSKPN Insyaf Medan selalu mengalami pasang surut atau dapat dikatakan tidak tetap sehingga mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan anggaran.

Hal ini menunjukkan bahwa BRSKPN Insyaf Medan masih belum mampu menempatkan anggaran yang sesuai, sehingga masih banyak hal-hal yang seharusnya diperbaiki serta ditindak lanjuti sebagai program kerja. Namun, terkait dengan hal ini BRSKPN Insyaf Medan masih belum terlihat efektif dalam merealisasikan anggarannya.

Berdasarkan penjelasan di atas makapenulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Anggaran Dan Realisasi Belanja Pada Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan”**.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas serta untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu:

- a. Cukup efektif anggaran belanja BRSKPN Insyaf Medan pada tahun 2016 sampai 2018, dimana hasil persentasenya tidak mencapai 100%.
- b. Target dan realisasi tidak sesuai dengan yang diharapkan dan realisasinya cenderung mengalami fluktuasi, yang artinya terdapat beberapa kenaikan

dan penurunan yang cukup signifikan, dimana dalam tiap tahun penggunaan anggaran pada BRSKPN Insyaf Medan selalu mengalami pasang surut atau dapat dikatakan tidak tetap sehingga mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan anggaran.

- c. BRSKPN Insyaf Medan masih belum mampu menempatkan anggaran yang sesuai, sehingga masih banyak hal-hal yang seharusnya diperbaiki serta ditindak lanjuti sebagai program kerja.
- d. BRSKPN Insyaf Medan masih belum terlihat efektif dalam merealisasikan anggarannya.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian penulis membatasi masalah hanya pada analisis efektivitas anggaran dan realisasi belanja pada Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, identifikasi masalah dan batasan masalah yang penulis rumuskan yaitu bagaimana efektivitas anggaran dan realisasi belanja pada Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas anggaran dan realisasi belanja pada Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan mengenai analisis efektivitas anggaran dan realisasi belanja pada Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan.

b. Bagi Organisasi

Penelitian ini berguna agar organisasi dapat mengambil keputusan mengenai analisis efektivitas anggaran dan realisasi belanja pada Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan jika nantinya menghadapi masalah yang serupa, sehingga kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini dapat diperbaiki dan lebih disempurnakan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Waney (2018), dengan judul: analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan

penelitian ini berjudul: analisis efektivitas anggaran dan realisasi belanja pada Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan.

Perbedaan penelitian terletak pada:

1. **Jumlah Data (n)** :penelitian terdahulu menggunakan data dari tahun 2012 –2014. Sedangkan penelitian ini menggunakan data dari tahun 2016 – 2018.
2. **Waktu Penelitian** : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2018 sedangkan penelitian ini tahun 2020.
3. **Lokasi Penelitian** : lokasi penelitian terdahulu di Dinas Pertanian Dan PeternakanProvinsi Sulawesi Utara, sedangkan penelitian ini dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas

2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Mulyadi (2015: 16) Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya.

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Menurut Nafarin (2015:13) Pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk

meminta pertanggung jawaban tersebut. Menurut Mahmudi (2016:56) Akuntabilitas merupakan instrumen yang menunjukkan apakah prinsip - prinsip pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan dan kesamaan hak dihadapan hukum telah dihargai atau tidak.

Akuntabilitas adalah hal yang sangat penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisien, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas dari administrasi publik. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para pegawai sipil dan otoritas publik. Menurut Stice (2015: 21) akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik yang baik.

Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggung jawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggung jawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu. Menurut Warren (2015:73) mendefenisikan akuntabilitas adalah: Akuntabilitas sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *stakeholders*. Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan

bahwa akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya.

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat dan mengukur perinsip-prinsip pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan, dan kesamaan hak dihadapan hukum telah diimplementasikan dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

2.1.1.2 Pengukuran Akuntabilitas

Menurut Hery (2016:33) indikator-indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. *Exemplary leadership*, dimaksudkan bahwa seorang pemimpin harus sensitif, responsif, akuntabel dan transparan kepada bawahan.
2. *Public Debate*, artinya sebelum kebijakan yang besar disahkan seharusnya diadakan public debate terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang maksimal.
3. *Coordination*, dimaksudkan bahwa koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya akuntabilitas.
4. *Autonomy*, artinya instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien dan paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi.

5. *Explicitness and clarity*, artinya standar karakteristik akuntabilitas harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan.
6. *Legitimacy and acceptance*, tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka pada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat ditentukan dapat diterima oleh semua pihak.
7. *Negotiation*, maksudnya harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggungjawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah.
8. *Educational campaign and publicity*, dimaksudkan perlu dibuatkan pilot *project* pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga akan diperoleh ekspektasi mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut.
9. *Feed back and evaluation*, yaitu bahwa akuntabilitas harus tentu menerus ditingkatkan dan disempurnakan, maka perlu informasi sebagai umpan baik dari penerima akuntabilitas serta dilakukan karakteristik perbaikannya.
10. *Adaption and recycling*, yaitu perubahan yang terjadi dimasyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Sedangkan menurut Mahmudi (2016:34) agar fungsi-fungsi manajemen berjalan sesuai harapan ada empat indikator akuntabilitas yang perlu dikarakteristik yaitu :

1. Kemampuan perencanaan
2. Kemampuan pengorganisasian
3. Kemampuan kepemimpinan
4. Kemampuan pengendalian

Kemampuan Perencanaan yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana cara mengelompokkan tugas-tugas itu, siapa yang harus melapor ke siapa, dan dimana keputusan harus dibuat. Kemampuan Pengorganisasian yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses memotivasi bawahan, mempengaruhi individu atau tim sewaktu mereka bekerja, memiliki saluran komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan dengan berbagai cara masalah perilaku pegawai.

Kemampuan Kepemimpinan yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses pemantauan akuntabilitas aktual, membandingkan aktual dengan standar, dan membuat koreksinya jika perlu. Kemampuan Pengendalian yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi untuk mencapai sasaran dan menyusun rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan.

2.1.1.3 Tujuan Akuntabilitas

Menurut Hery (2016:35), tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap kepercayaan publik yang tinggi akan dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintahan akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Hansen (2016:15) menyatakan tujuan utama akuntabilitas adalah untuk

mendorong terciptanya akuntabilitas pemerintahan sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah menilai akuntabilitas pemerintahan dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Berkaitan dengan tujuan akuntabilitas yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan menurut Donald (2015:14) bahwa: Guna mengukur akuntabilitas mereka secara objektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil karakteristik harus dimasyarakatkan dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Pemerintahan dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil akuntabilitas pemerintahan dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Hery (2016:37) ada delapan hal yang harus dikerjakan pemerintahan untuk peningkatan akuntabilitas:

1. Pemerintahan harus menyusun aturan main tentang system akuntabilitastermasuk mekanisme pertanggung jawaban.
2. Pemerintahan perlu menyusun pedoman tingkah laku dan system pemantauan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan dan system pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
3. Pemerintahan menyusun rencana pengembangan pemerintahan dan menyampaikan kepada publik/stakeholders diawal setiap tahun anggaran.

4. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran akuntabilitas pemerintahan dan disampaikan kepada *stakeholders*.
5. Melakukan pengukuran pencapaian akuntabilitas pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/*stakeholders* di akhir tahun.
6. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.
7. Menyediakan informasi kegiatan pemerintahan kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
8. Memperbaharui rencana kerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

2.1.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Menurut Hery (2016:39), banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas organisasi baik publik maupun swasta. Secara detail faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian akuntabilitas organisasi sebagai berikut:

1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi akuntabilitas organisasi tersebut.
2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.
3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan.
4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan seperti dalam proses penyusunan anggaran dan penggunaan dana alokasi anggaran.

5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasi.
6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya.

Menurut Hery (2016:41), mengemukakan bahwa akuntabilitas organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor eksternal, yang terdiri dari
 - a. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
 - b. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu system ekonomi yang lebih besar.
 - c. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan akuntabilitas organisasi.
2. Faktor internal, yang terdiri dari :
 - a. Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi
 - b. Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada

- c. Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
- d. Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

2.1.2 Anggaran Sektor Publik

2.1.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran Sektor Publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Karena pada sektor publik anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk di kritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Penggunaan anggaran pada sektor publik sebagai alat penuntun bagi perencanaan dan pengendalian sumber daya, baik itu keuangan atau sebaliknya. Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan.

Mardiasmo (2017:62) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang (Nafarin, 2015:19). Sedangkan pengertian anggaran menurut "*Commite on Governmental Accounting*" yang dikutip oleh (Haruman, 2015:6) anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Bastian (2017:166) Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satuan atau beberapa tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

4. Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.2.2 Fungsi dan Mnafaat Anggaran Sektor Publik

Menurut Hery (2016:33), anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran dalam

bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:

- a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.
- b. Menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*).
- c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians.
- d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran Sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Dalam pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai, dikaitkan dengan anggaran yang ditetapkan.

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable* maksudnya target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Share*)

Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non publik, seperti LSM, Perguruan Tinggi,

Organisasi Keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencana kinerja publik (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

Manfaat proses penganggaran menurut Stice (2015 : 343) adalah sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan alat komunikasi bagi rencana manajemen melalui organisasi.
2. Anggaran memaksa manajer untuk memikirkan dan merencanakan masa depan.
3. Proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada berbagai bagian dari organisasi agar dapat digunakan seefektif mungkin.
4. Proses penganggaran dapat mengungkap adanya masalah potensial sebelum terjadinya.
5. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan cara mengintegrasikan rencana dari berbagai bagian.
6. Anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat berlaku bagi *benchmark* untuk mengevaluasi kinerja pada waktu berikutnya.

2.1.2.3 Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2017:87) prinsip-prinsip anggaran sektor publik antara lain:

1. Otorisasi oleh legislatif Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif membelanjakan anggaran tersebut.
2. Komprehensif Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non anggaran pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
3. Keutuhan anggaran Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*)
4. *Nondiscretionary appropriation* Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.
5. Periodik Anggaran merupakan suatu proses yang periodik dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.
6. Akurat Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat digunakan sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.
7. Jelas, yaitu anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.
8. Diketahui publik dan anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.1.2.4 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Menurut Warren (2015:72), dalam penyusunan anggaran sektor publik, anggaran disusun berdasarkan jenisnya. Ada dua jenis anggaran sektor publik, yaitu:

1. Anggaran Operasional

Anggaran digunakan untuk melakukan perencanaan kebutuhan dalam menjalankan organisasi sektor publik. Belanja operasional merupakan tidak untuk menambah aktiva organisasi dan masa manfaatnya hanya satu periode.

2. Anggaran Modal

Anggaran modal menunjukkan rencana membelanjakan aktiva tetap yang sifatnya jangka panjang dan digunakan untuk kegiatan organisasi seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun.

2.1.2.5 Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Menurut Gondodiyoto (2015:94), anggaran yang dipresentasikan setiap tahun memberikan informasi rinci tentang program apa saja yang direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Mardiasmo (2017:68) mengatakan proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu:

1. Membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar masing-masing bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan/atau jasa publik melalui proses pemrioritasan.

3. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD serta masyarakat luas.

Pada dasarnya mekanisme penganggaran sektor publik tidak berbeda dengan sektor swasta. Siklus anggaran dalam sektor publik memiliki empat tahapan yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2009:70), yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan anggaran, dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Dalam persoalan estimasi, perlu diperhatikan adanya faktor tingkat ketidakpastian. Di Indonesia, proses perencanaan APBD menekankan pada pendekatan *button-up planning* dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Pada Pemerintah Pusat, perencanaan pembangunan dimulai dari penyusunan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA). Berdasarkan PROPENAS dan RENSTRA serta analisis fiskal dan makro ekonomi, kemudian dibuat persiapan APBN dan Rencana Pembangunan Tahunan (RAPETA).

Sementara di tingkat daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.108 Tahun 2000 Pemerintah Daerah disyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas PROPEDA dan RENSTRADA. PROPEDA dan RENSTRADA dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD dalam kerangka waktu lima tahun yang kemudian dijabarkan pelaksanaannya dalam kerangka tahunan.

Rincian RENSTRADA untuk setiap tahunnya akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan REPETADA dan APBN.

Berdasarkan RESTRADA yang telah dibuat serta analisis fiskal dan ekonomi daerah, menurut ketentuan PP No.105 Tahun 2000 Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menetapkan arah dan kebijakan umum APBD, setelah itu menerapkan strategi dan prioritas APBD. Proses Perencanaan Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahunan (REPETADA) dan APBD pada hakekatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap ratifikasi anggaran merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Dalam tahap ini integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting. Karena pada tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen menjadi hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manager keuangan publik. Dalam hal ini, manager keuangan publik bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang handal dan memadai untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah

disepakati bahkan dapat diandalkan untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen dalam tahap implementasi sudah baik, maka dalam tahap ini tidak akan menemui banyak permasalahan.

2.1.2.6 Aspek-aspek dalam Penganggaran Sektor Publik

Menurut Nafarin (2015:45), dalam anggaran sektor publik, terdapat dua aspek yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan penyusunan anggaran. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah aspek perilaku dan aspek politik. Anggaran dalam sektor publik dapat mempengaruhi perilaku baik pimpinan maupun pegawai yang berperan dalam penyusunan anggaran tersebut. Aspek perilaku dalam penyusunan anggaran ini dapat mempengaruhi kinerja anggaran itu sendiri. Ada tiga aspek perilaku dalam penganggaran sektor publik. Ketiga aspek tersebut yaitu:

1. Partisipasi Anggaran

Merupakan keterlibatan staf atau manager dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran dapat berdampak positif sebagai motivasi dalam meningkatkan tanggungjawab dalam pencapaian target anggaran.

2. Keterlibatan Manajemen Senior

Dalam penganggaran sektor publik, keterlibatan manajemen senior tercermin dalam peran aktif Tim Anggaran Pemerintah dalam memberikan

arahan, evaluasi dan koreksi terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh unit kerja. Kualitas anggaran dan kinerja anggaran akan terlihat baik jika Tim Anggaran Pemerintah terlibat secara aktif dan tidak hanya sekedar pasang nama.

3. Senjangan Anggaran

Senjangan anggaran (*budgetary slack*) merupakan selisih antara jumlah yang dianggarkan dengan kemampuan atau kebutuhan riil yang dimiliki pengguna anggaran. Senjangan anggaran dapat bersifat positif dan negatif tergantung Tim Anggaran yang menempatkan *slack* pada anggaran tersebut.

Proses penyusunan anggaran sektor publik merupakan suatu proses politik. Suatu anggaran dibuat oleh pemerintah untuk memilih apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah atau dapat dikesampingkan. Program apa saja yang seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu, dan keseluruhannya harus mendapat persetujuan dari dewan legislatif. Anggaran sektor publik biasanya menganut pada siapa yang memimpin suatu pemerintahan saat itu. Terdapat beberapa area atau tahapan dalam siklus anggaran yang melibatkan terjadinya proses politik anggaran. Tahapan-tahapan tersebut adalah penentuan kebijakan anggaran, penentuan prioritas program dan plafon anggaran, penentuan alokasi anggaran, pembahasan anggaran, perubahan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran. Pada ke-enam tahapan tersebut, suatu nuansa politik tidak dapat dipisahkan.

2.1.2.7 Partisipasi Anggaran

Sesuai dengan teori yang didapat mengenai partisipasi anggaran, maka dapat ditentukan indikator partisipasi anggaran, yaitu:

1. Keterlibatan

Keuangan organisasi dalam anggaran pendapatan dan belanja juga merupakan pembiayaan setiap program dan kegiatan organisasi.

2. Pengaruh

Partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut

3. Komitmen

Karena identifikasi dan ego-keterlibatan dengan tujuan anggaran, partisipasi berkaitan dengan akuntabilitas dan begitu mengarah pada peningkatan motivasi dan komitmen terhadap budget.

2.1.2.8 Pengertian Evaluasi Anggaran

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpanan anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian akuntabilitas departemen (Kenis, 2013). Hal ini akan mempengaruhi perilaku, sikap dan akuntabilitas manajer. *Punitive approach* dapat mengakibatkan rendahnya motivasi dan sikap yang negatif, sedangkan *supportive approach* dapat mengakibatkan sikap dan perilaku yang positif.

Donald (2015:27) evaluasi yang bersifat *punitive* dapat menyebabkan rendahnya motivasi, sebaliknya evaluasi yang bersifat *supportive* dapat

menghasilkan sikap dan tingkah laku positif. Hansen (2016:54) menjelaskan evaluasi adalah penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab. Menurut Hery (2016:23), evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi akuntabilitas mereka.

Hansen (2016:32) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah daerah Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, namun pada saat pelaksanaan mereka tidak melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga membuat akuntabilitas mereka menjadi rendah.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan evaluasi anggaran adalah evaluasi anggaran merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya dan digunakan sebagai dasar penilaian akuntabilitas. Dimana apabila evaluasi yang dilakukan bersifat punitive maka motivasi menjadi rendah, dan sebaliknya jika evaluasi yang dilakukan bersifat supportive akan menghasilkan tingkah laku yang positif dan dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen.

2.1.2.9 Tujuan dan Fungsi Evaluasi Anggaran

Evaluasi secara mendasar mempunyai 4 tujuannya yaitu:

1. Meyakinkan bahwa akuntabilitas yang sesungguhnya sesuai dengan akuntabilitas yang diharapkan.
2. Memudahkan untuk membandingkan antara akuntabilitas individu satu dengan yang lainnya.
3. Sistem evaluasi akuntabilitas dapat memicu suatu isyarat tanda bahaya, memberisinyal mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi dan untuk menilai pembuatan keputusan manajemen (Kurnia, 2010).

Menurut Hansen (2016: 34) tujuan dari evaluasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai akuntabilitas kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai akuntabilitas kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Menurut Supriyono (2011:41) evaluasi anggaran mempunyai beberapa

macam fungsi antara lain untuk :

1. Fungsi Koordinasi

Evaluasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada didalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras kearah pencapaian tujuan. Perlu diketahui bahwa koordinasi harus diusahakan, jadi tidak dapat diharapkan berjalan secara otomatis karena setiap individu didalam organisasi mempunyai kepentingan dan persepsi yang berbeda terhadap tujuan organisasi. Proses untuk menyelaraskan hubungan antara pegawai dan pekerja mereka agar saling berhubungan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan membagi pekerjaan diantara kelompok, individu, dan mengkoordinasikan hubungan antara kegiatan individu dan kelompok.

2. Fungsi Komunikasi

Jika organisasi diinginkan berfungsi secara efisien, maka organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi melalui dan berbagai unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, rencana, pelaksanaan, dan penyimpangan yang timbul. Dalam penyusunan, berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran. Selanjutnya, setiap orang yang bertanggungjawab terhadap anggaran harus dinilai mengenai prestasinya melalui laporan pengendalian produk.

3. Fungsi Motivasi

Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana didalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. Memotivasi para pelaksana dapat didorong dengan pemberian insentif dalam bentuk hadiah berupa uang, penghargaan, dan sebagainya kepada mereka yang mencapai prestasi.

4. Fungsi Pengendalian

Evaluasi anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut. Pengendalian pada dasarnya adalah membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul apakah sudah menjadi "tanda bahaya" bagi organisasi atau unit-unitnya. Penyimpangan tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan umpan balik untuk perbaikan masa yang akan datang. Seringkali istilah perencanaan dan pengendalian disatukan dan seringkali kedua istilah tersebut digunakan untuk maksud yang sama, sistem anggaran yang baik harus dihubungkan dengan perencanaan dan pengendalian, perencanaan yang baik tanpa pengendalian yang efektif berakibat pemborosan dana dan waktu. Sebaliknya, tanpa perencanaan tidak dapat dilakukan pengendalian ke arah tujuan yang ingin dicapai.

5. Fungsi Pendidikan

Evaluasi anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan sekaligus menghubungkan

dengan pusat pertanggung jawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, anggaran bermanfaat untuk latihan kepemimpinan bagi para manajer atau calon manajer agar dimasa depan mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi.

2.1.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

2.1.3.1 Pengertian Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran atau budget merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan-kegiatan operasional perusahaan agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Anggaran terdiri dari serangkaian taksiran-taksiran yang dapat dipakai sebagai suatu program untuk menjalankan kegiatan perusahaan pada suatu periode, khususnya pada masa yang akan datang. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Yang dimaksud dengan kejelasan sasaran anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran mencakup luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah serta mudah dipahami oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Hal tersebut akan mendorong pegawai untuk dapat melakukan yang terbaik. Kesenjangan anggaran merupakan tindakan bawahan yang mengecilkan kapasitas produktifnya ketika bawahan diberi kesempatan untuk menentukan standar akuntabilitasnya.

Mahmudi (2016:45) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif daripada tidak menetapkan tujuan spesifik yang akan mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Hery (2016:76) Kejelasan sasaran anggaran yaitu menggambarkan tujuan anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketidak jelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Mahmudi (2016:56) “Penentuan sasaran anggaran secara spesifik lebih produktif dibandingkan jika tidak ada penentuan sasaran. Hal tersebut akan mendorong pegawai untuk dapat melakukan yang terbaik. Anggaran dapat menimbulkan perasaan tertekan bagi pegawai. Hal ini terjadi apabila anggaran disusun terlalu kaku atau target yang ditetapkan dalam anggaran sulit untuk dicapai. Mulyadi (2016:57) Tujuan dan sasaran APBD harus disesuaikan dengan lima kriteria sebagai berikut: sebagai berikut:

1. Spesifik
2. Terukur.

3. Menantang tapi realisti.
4. Berorientasi pada hasil akhir
5. Memiliki batas waktu.

2.1.3.2 Tujuan Kejelasan sasaran anggaran

Tujuan kejelasan sasaran anggaran disusunnya anggaran (Mardiasmo, 2017:66), antara lain:

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
2. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan.
3. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan.
4. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.
6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Menurut Mardiasmo (2017: 71) tujuan dari kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut :

1. Memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai akuntabilitas kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini karakteristik mengungkapkan seberapa jauh tujuantujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai - nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai akuntabilitas kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

2.1.3.3 Fungsi Kejelasan sasaran anggaran

Menurut Mardiasmo (2017: 74) kejelasan sasaran anggaran mempunyai beberapa macam fungsi antara lain untuk :

1. Fungsi Koordinasi

Kejelasan sasaran anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada didalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras kearah pencapaian tujuan. Perlu diketahui bahwa koordinasi harus diusahakan, jadi tidak dapat diharapkan berjalan secara otomatis karena setiap individu didalam organisasi mempunyai kepentingan dan persepsi yang berbeda terhadap tujuan organisasi. Proses untuk menyelaraskan hubungan antara pegawai dan pekerja mereka agar saling berhubungan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan membagi pekerjaan diantara kelompok, individu, dan mengkoordinasikan hubungan antara kegiatan individu dan kelompok.

2. Fungsi Komunikasi

Jika organisasi diinginkan berfungsi secara efisien, maka organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi melalui dan berbagai unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, rencana, pelaksanaan, dan penyimpangan yang timbul. Dalam penyusunan, berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran. Selanjutnya, setiap orang yang bertanggung jawab terhadap anggaran harus dinilai mengenai prestasinya melalui laporan pengendalian produk.

3. Fungsi Motivasi

Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana didalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. Memotivasi para pelaksana dapat didorong dengan pemberian insentif dalam bentuk hadiah berupa uang, penghargaan, dan sebagainya kepada mereka yang mencapai prestasi.

4. Fungsi Pengendalian

Kejelasan sasaran anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut. Pengendalian pada dasarnya adalah membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul apakah sudah menjadi "tanda bahaya" bagi organisasi atau unit-unitnya. Penyimpangan tersebut digunakan sebagai dasar karakteristik

atau penilaian prestasi dan umpan balik untuk perbaikan masa yang akan datang. Seringkali istilah perencanaan dan pengendalian disatukan dan seringkali kedua istilah tersebut digunakan untuk maksud yang sama, sistem anggaran yang baik harus dihubungkan dengan perencanaan dan pengendalian, perencanaan yang baik tanpa pengendalian yang efektif berakibat pemborosan dana dan waktu. Sebaliknya, tanpa perencanaan tidak dapat dilakukan pengendalian ke arah tujuan yang ingin dicapai.

5. Fungsi Pendidikan

Kejelasan sasaran anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggung jawaban yang dipimpinnya dan sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggung jawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, anggaran bermanfaat untuk latihan kepemimpinan bagi para manajer atau calon manajer agar dimasa depan mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi.

2.1.3.4 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Mardiasmo (2017: 76), untuk mengukur kejelasan sasaran anggaran adalah menggunakan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Jelas

Sasaran yang ingin dicapai harus jelas dan digambarkan secara terperinci sehingga semua pihak dapat memahami.

2. Spesifik

Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut

harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.

3. Dapat dipahami

Sasaran yang dibuat secara jelas dan spesifik harus dapat dipahami oleh semua pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam pencapaiannya

4. *Timeliness*

Menyatakan ketepatan waktu dalam memperoleh informasi mengenai suatu kejadian.

2.1.4 Laporan Realisasi Anggaran Publik

2.1.4.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran Publik

Menurut Mulyadi (2015:55), realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.2 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran Publik

Menurut Mulyadi (2015:56), laporan realisasi anggaran yang disebut dengan LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja. Laporan realisasi anggaran yang disusun dalam laporan keuangan akan dijelaskan secara rinci dalam suatu catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut akan memuat informasi-informasi yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter,

sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka - angka yang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut.

Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP) yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan terdiri dari:

1. Pendapatan (Basis Kas) adalah Hak penerimaan oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas Pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.
2. Pendapatan (Basis Akruwal) adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
3. Belanja (Basis Kas) adalah Semua pengeluaran oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana

lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali ke Pemerintah.

4. Belanja (Basis Akrua) adalah Kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
5. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
6. Pembiayaan (*financing*) adalah Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran. Pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
7. Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah.

2.1.4.3 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran Publik

Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintahan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian

target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksikan sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Laporan tersebut juga memprediksi resiko ketidakpastian dari sumber-sumber daya ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah tersebut. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan :

1. Telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan hemat.
2. Telah sesuai dengan anggarannya.
3. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan tujuan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
7. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumberdaya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.1.4.4 Komponen Laporan Realisasi Anggaran Publik

Menurut Donald (2015:67), komponen laporan realisasi anggaran publik adalah:

8. Pendapatan LRA

Pendapatan negara/daerah merupakan iuran rakyat yang diamanatkan kepada Pemerintah, sehingga pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah.

Pembukuan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat notenyanamun ketika biaya atas pendapatan tersebut bersifat variabel dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka dapat mencatat nilai netonya.

9. Belanja

Belanja adalah pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otoritas kredit anggaran (*allotment*). Belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung atau melalui dana kas kecil yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran. Pembayaran diberikan langsung kepada yang berhak jika jumlah, peruntukan, dan penerimanya sudah pasti. Dana kas kecil digunakan pemerintah untuk membayar keperluan sehari-hari kantor. Pada dasarnya pemerintah menggunakan sistem dana tetap.

Jika terjadi kekeliruan dalam pengeluaran belanja maka koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja pada periode yang sama.

10. Surplus /Defisit – LRA

Surplus – LRA adalah selisih lebih antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit – LRA adalah selisih kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit – LRA. Perhitungan surplus/defisit – LRA dilakukan di tingkat pemerintah pusat atau daerah melalui jurnal penutup pada saat dilakukan proses konsolidasi.

11. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun bertahun – tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran publik terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi publik, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan pihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat uang diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan dicatat berdasarkan asas bruto. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah.

12. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA diperoleh dari penutupan akun

Surplus/Defisit dan pembiayaan neto pada akhir tahun anggaran, untuk selanjutnya dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

2.1.5 Efektivitas Realisasi Anggaran Sektor Publik

2.1.5.1 Pengertian Efektivitas Realisasi Anggaran Sektor Publik

Menurut Mahmudi (2016:20), Efektivitas kinerja realisasi sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah di terapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (*cost of outcome*). Menurut Mahmudi (2016:22) efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur *outcome*. Menurut Mahmudi (2016:25), tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2016:26), rasio efektivitas belanja menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai standart ideal efektivitas belanja dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sangat efektif : > 100%
2. Efektif : 100%
3. Cukup efektif : 90% - 99%
4. Kurang efektif : 75% - 89%
5. Tidak efektif : < 75%

2.1.5.2 Manfaat Analisis Realisasi Anggaran Sektor Publik

Menurut Hansen (2016:83), manfaat analisis realisasi anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara kompharatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang

indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi : telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, dan telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan analisis efektivitas realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Waney (2018)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan Jadi secara keseluruhan dari 2012-2014, itutingkat efektivitas anggaran belanja pertanian dan peternakan Sulawesi Utara Provinsi mengalami peningkatan yang efektif. Dalam implementasi pertanian dan anggaran belanja ternak provinsi Sulut tahun 2012-2014, sudah baik diproses dan sangat efisien. Implementasi anggaran 2012-2014 dikategorikan sangat efisien karena tingkat efisiensi di bawah 60%.
2	Pankey (2015)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.	Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran	Deskriptif	Hasil penelitian untuk tingkat efektivitas pada tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efektif dan tingkat efisiensi dari tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efisien. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi sebaiknya meningkatkan

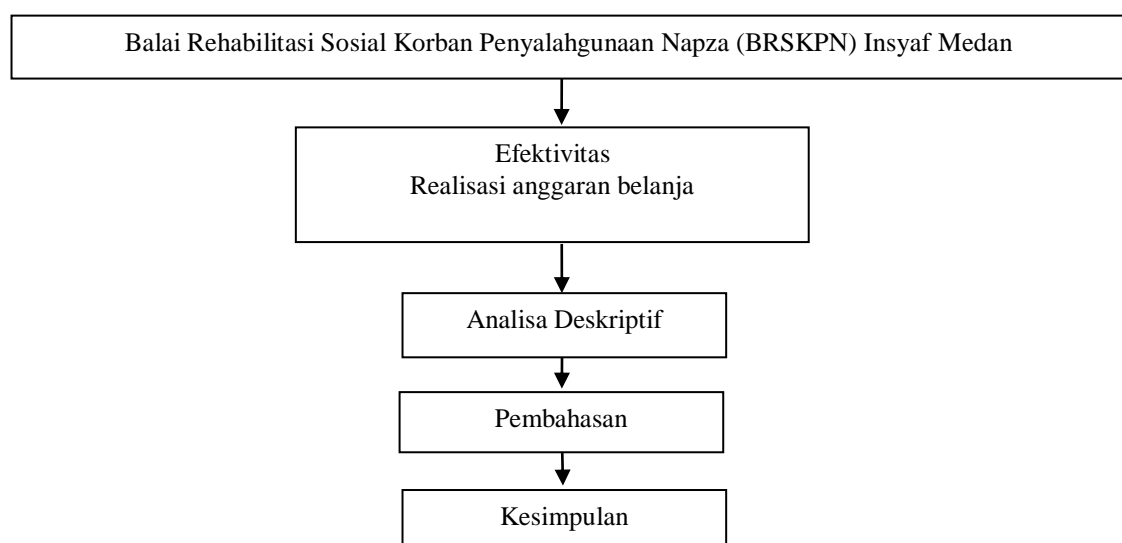
No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
					efektivitas dan efisiensi anggaran belanja, dibutuhkan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun swasta serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan maupun perencanaan anggaran.
3	Sari (2018)	Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja	Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran	Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2011-2015 bervariasi. Dimana pada tahun 2014 masuk dalam kriteria cukup efektif, dan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015 masuk kriteria kurang efektif, dikarenakan realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan jauh dengan target anggaran belanja. Sehingga ada beberapa kegiatan yang dianggarkan tapi tidak direalisasikan secara efektif. Dalam pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Kota tahun 2011-2015 secara keseluruhan efisien. Dalam melaksanakan anggaran tahun 2011 dikategorikan sangat efisien dan pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dikategorikan efisien

Sumber : Diolah Penulis 2020

2.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dibuat kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah Penulis 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Rusiadi (2013:14), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau penghubungan dengan variabel lain.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (BRSKPN) Insyaf Medan yang beralamat di JL. Bedikari No. 37 Desa Lau Bakeri Kab. Deli Serdang Kec. Kutalimbaru Medan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan April 2020 sampai dengan selesai, dengan format berikut:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan				
		April 2020	Mei 2020	Juni 2020	Juli 2020	Agustus 2020
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■				
2	Penyusunan Proposal		■			
3	Seminar Proposal			■		
4	Perbaikan Acc Proposal				■	
5	Pengolahan Data				■	
6	Penyusunan Skripsi					■
7	Bimbingan Skripsi					■
8	Meja Hijau					■

Sumber: Penulis (2020)

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel yaitu: efektivitas anggaran dan realisasi belanja.

3.3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teoritis dan definisi atau gabungan keduanya, yang ada di lapangan.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1	Efektivitas anggaran dan realisasi belanja	Ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. (Mahmudi, 2016:20)	$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100$ (Mahmudi, 2016:25)	Rasio

Sumber: Penulis (2020)

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data sekunder dalam bentuk kuantitatif yaitu data yang diukur berdasarkan skala rasio.

3.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data tersebut tersedia pada laporan Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan dengan periode data penelitian ini meliputi data dari tahun 2016 sampai 2018.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan tahunan maupun informasi yang terkait dengan lingkup penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono (2014:244) teknik analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:206) analisis deskriptif adalah: “Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. Tahapan-tahapan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, yaitu memahami fenomena yang terjadi, membuat identifikasi masalah dan merumuskan masalah penelitian
2. Menguraikan tujuan dan manfaat penelitian
3. Menentukan ruang lingkup dan batasan penelitian

4. Melakukan kajian pustaka
5. Menyusun rancangan pemikiran penelitian
6. Membuat definisi operasional variabel
7. Menentukan instrumen penelitian
8. Mengumpulkan data
9. Menganalisa data
10. Mengambil kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan

Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "Insyaf" di Medan Sumatera Utara melaksanakan Respon kasus kepada korban penyalahgunaan Napza di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari tanggal 22-25 Februari 2020. Kegiatan ini terlaksana karena adanya laporan dan permohonan dari Kepala Desa Laut Dendang agar warganya yang telah terpapar oleh Narkoba mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dari BRSKPN "Insyaf" Medan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penerima Wajib Laporan menekankan bahwa korban penyalahgunaan Napza harus mendapatkan Rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial karena mereka adalah korban yang harus dilindungi," ungkap Sulaiman Kepala BRSKPN "Insyaf" Medan saat memberikan materi kepada peserta.

Pada tahun 2020, Balai kami hanya mampu melakukan rehabilitasi sosial sebanyak 200 orang per tahun, tentu saja tidak sebanding dengan tingginya angka penyalahgunaan Napza di Sumatera Utara yang mencapai 250 ribu berdasarkan data BNN Provinsi Sumut.

4.1.2 Efektivitas Realisasi Anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan

Berikut ini adalah data anggaran dan realisasi Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan.

Tabel 4.1 Data Anggaran dan Realisasi Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan Tahun 2016 sampai 2018

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
2016	15.017.046.000	14.547.009.109	470.036.891
2017	10.846.683.000	10.654.612.916	192.070.084
2018	11.832.766.000	11.809.800.212	22.965.788

Sumber: BRSKPN Insyaf Medan (2020)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 anggaran sebesar Rp.15.017.046.000 dan terjadi penurunan sebesar Rp.10.846.683.000 akan tetapi pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp.11.832.766.000. Realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp.14.547.009.109 dan terjadi penurunan sebesar Rp.10.654.612.916 akan tetapi pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp.11.89.800.212.

Pada tahun 2016 sampai 2018 jumlah anggaran tidak sesuai dengan realisasi, dimana anggaran tahun 2016 sebesar Rp.15.017.046.000 sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp.14.547.009.109, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.470.036.891.

Tahun 2017 anggaran sebesar Rp.10.846.683.000 sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp.10.654.612.916, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.192.070.085.

Tahun 2018 anggaran sebesar Rp.11.832.766.000 sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp.11.809.800.212, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.22.965.788.

Mahmudi (2016:25) menyatakan bahwa tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2016:26), rasio efektivitas belanja menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai standart ideal efektivitas belanja dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sangat efektif : > 100%
2. Efektif : 100%
3. Cukup efektif : 90% - 99%
4. Kurang efektif : 75% - 89%
5. Tidak efektif : < 75%

Tabel 4.2 Data Efektivitas Realisasi Anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan Tahun 2016 sampai 2018

Tahun	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efisiensi (%)	Standart Efektif 100%
2016	15.017.046.000	14.547.009.109	96,87%	Cukup Efektif
2017	10.846.683.000	10.654.612.916	98,23%	Cukup Efektif
2018	11.832.766.000	11.809.800.212	99,81%	Cukup Efektif

Sumber: BRSKPN Insyaf Medan (2020)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 realisasi anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan sebesar 96,87%, sehingga dapat dikatakan realisasi anggaran cukup efektif. Tahun 2017 realisasi anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan sebesar 98,23%,

sehingga dapat dikatakan realisasi anggaran cukup efektif. Tahun 2018 realisasi anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan sebesar 99,81%, sehingga dapat dikatakan realisasi anggaran cukup efektif. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 sampai 2018 realisasi anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan belum dinyatakan efektif karena tidak mencapai 100%.

Tingkat efektivitas anggaran belanja terus berfluktuasi dari tahun ketahun, kadang mengalami peningkatan kadang mengalami penurunan. Naik turunnya tingkat efektivitas anggaran belanja disebabkan dimana realisasi anggaran yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu pengeluaran anggaran belanja tidak tepat waktu dalam pembiayaan anggaran belanja. Dari masalah yang ditimbulkan ini, solusi agar supaya tingkat efektivitas anggaran belanja bisa efektif, harus adanya koordinasi dan kerja samayang baik antara setiap bidang-bidang dan para tenaga kerja agar dapat merealisasikan target anggaran dari perencanaan setiap program. Agar dapat merealisasikan target anggaran dari setiap program, harus adanya pengawasan yang baik atas penyusunan program dan anggaran dari manajemen Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan agar keseluruhan perencanaan dari setiap program dan penganggarannya bisa terealisasi sesuai target yang direncanakan, pengawasan ini berguna untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan agar perencanaan program dapat segera diperbaiki dan disusun secara akurat.

4.2 Pembahasan

Pembahasan di dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2016 realisasi anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan sebesar 96,87%, sehingga dapat dikatakan realisasi anggaran cukup efektif.

Tahun 2017 realisasi anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan sebesar 98,23%, sehingga dapat dikatakan realisasi anggaran cukup efektif.

Tahun 2018 realisasi anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan sebesar 99,81%, sehingga dapat dikatakan realisasi anggaran cukup efektif.

Dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 sampai 2018 realisasi anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan belum dinyatakan efektif karena tidak mencapai 100%.Tingkat efektivitas anggaran belanja terus berfluktuasi dari tahun ketahun, kadang mengalami peningkatan kadang mengalami penurunan. Naik turunnya tingkat efektivitas anggaran belanja disebabkan dimana realisasi anggaran yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu pengeluaran anggaran belanja tidak tepat waktu dalam pembiayaan anggaran belanja.

Dari masalah yang ditimbulkan ini, solusi agar supaya tingkat efektivitas anggaran belanja bisa efektif, harus adanya koordinasi dan kerja samayang baik antara setiap bidang-bidang dan para tenaga kerja agar dapat merealisasikan target anggaran dari perencanaan setiap program. Agar dapat merealisasikan target

anggaran dari setiap program, harus adanya pengawasan yang baik atas penyusunan program dan anggaran dari manajemen Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan agar keseluruhan perencanaan dari setiap program dan penganggarannya bisa terealisasi sesuai target yang direncanakan, pengawasan ini berguna untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan agar perencanaan program dapat segera diperbaiki dan disusun secara akurat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka pengujian hipotesis yang dilakukan dengan analisis maka dapat ditarik kesimpulan adalah pada tahun 2016 realisasi anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan sebesar 96,87%, sehingga dapat dikatakan realisasi anggaran cukup efektif. Tahun 2017 realisasi anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan sebesar 98,23%, sehingga dapat dikatakan realisasi anggaran cukup efektif. Tahun 2018 realisasi anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan sebesar 99,81%, sehingga dapat dikatakan realisasi anggaran cukup efektif.

Dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 sampai 2018 realisasi anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan belum dinyatakan efektif karena tidak mencapai 100%. Tingkat efektivitas anggaran belanja terus berfluktuasi dari tahun ketahun, kadang mengalami peningkatan kadang mengalami penurunan. Naik turunnya tingkat efektivitas anggaran belanja disebabkan dimana realisasi anggaran yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu pengeluaran anggaran belanja tidak tepat waktu dalam pembiayaan anggaran belanja.

5.2 Saran

Dari beberapa keterbatasan penelitian ini maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya diantaranya adalah:

1. Harus adanya koordinasi dan kerja samayang baik antara setiap bidang-bidang dan para tenaga kerja agar dapat merealisasikan target anggaran dari perencanaan setiap program.
2. Agar dapat merealisasikan target anggaran dari setiap program, harus adanya pengawasan yang baik atas penyusunan program dan anggaran dari manajemen Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Insyaf Medan agar keseluruhan perencanaan dari setiap program dan penganggarannya bisa terealisasi sesuai target yang direncanakan, pengawasan ini berguna untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan agar perencanaan program dapat segera diperbaiki dan disusun secara akurat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Bastian, Indra. (2017). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Erlangga: Jakarta.
- Donald E. Kieso, dkk. (2015). Akuntansi Intermediate. Jakarta: Erlangga.
- Gondodiyoto, Sanyoto. (2015). Audit Sistem Informasi, Edisi Revisi, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Hansen, Don R dan Marynne M. Mowen. (2016). Akuntansi Manajemen, Edisi Tujuh, Salemba Empat, Jakarta.
- Haruman dan Sri Rahayu. (2015). "Penyusunan Anggaran". Edisi Pertama, Salemba Empat : Jakarta.
- Hery. (2016). Auditing I, Dasar-dasar Pemeriksaan Auditing, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Hidayat, R. Rusiadi, dan M. Isa Indrawan. 2014. Teknik Proyeksi Bisnis. USU Press. Medan
- Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi. 2013. Metode Penelitian. USU Press. Medan
- Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama. UUI Press. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. (2015). Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta
- Nafarin. (2015). "Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan". Edisi Kesatu. Salemba Empat : Jakarta.
- Pangkey, Imanuel. (2015). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
- Rusiadi, et al, (2013). Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan. Medan : USU Press.
- Sari, Dwi Nofita. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja.
- Stice dan Skousen. (2015). Akuntansi Intermediate. Edisi Keenam Belas, Buku I. Salemba Empat, Jakarta.

Waney, Cindy Kareima. (2018). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara.

Warren Carl. S, James M. Reevedan Philip E. Fees. (2015). Pengantar Akuntansi. Edisi 21. Salemba Empat, Jakarta.

JURNAL :

Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). *Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model*. Business and Management Horizons, 5(2), 49-59

Andika, R. (2019). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*. JUMANT, 11(1), 189-206.

Ardian, N. (2019). *Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB*. JEpa, 4(2), 119-132.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). “*Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat*”. Jurnal Soumatara Law Review, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Febrina, A. (2019). *Motif Orang Tua Mengunggah Foto Anak Di Instagram (Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek)*. Jurnal Abdi Ilmu, 12(1), 55-65.

Hidayat, R. (2018). *Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia*. JEpa, 3(2), 133-149.

Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.

Malikhah, I. (2019). *Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi*. Jument, 11(1), 67-80.

Nasution, A. P. (2019). Implementasi e-budgeting sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah daerah kota binjai. Jurnal akuntansi bisnis dan publik, 9(2), 1-13.

Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). *Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour*. Journal of Business and Retail Management Research, 12(2).

- Pramono, C. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(1), 62-78.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas Pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada badan keuangan daerah kabupaten tanah datar. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(1), 99-111.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching*. International Journal of Business and Management Invention, 6(1), 73079.
- Siregar, N. (2018). *Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoeng Deli Medan*. JUMANT, 8(2), 87-96.
- Yanti, E. D., & Sanny, A. *The Influence of Motivation, Organizational Commitment, and Organizational Culture to the Performance of Employee Universitas Pembangunan Panca Budi*.